

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *Corporate Governance*. Masalah agensi timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara *shareholder* dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para *shareholder (principal)*, namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan *shareholder* (Putra, 2011).

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laporan keuangan dibuat berdasarkan sistem akuntansi untuk meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh *agent* sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi pekerjaan dari *agent*. Dengan demikian *principal* dapat memberikan kompensasi kepada agen untuk meningkatkan lagi kesejahteraan atas tanggungjawabnya. Untuk menyelaraskan berbagai kepentingan baik dari *agent* maupun *principal* dapat melakukan mekanisme *monitoring*, namun mekanisme tersebut akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung oleh pihak yang berkepentingan tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya keagenan bisa dibagi menjadi tiga yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk mematuhi dan menepatkan mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan *principal*. Oleh karena itu *corporate governance* yang sebagai dasar dari teori keagenan dapat berfungsi untuk memberi keyakinan kepada investor agar dapat menerima *return* atas dana yang mereka investasikan.

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam lingkungan perusahaan yang sedang beroperasi sehingga aktivitas mereka diterima oleh pihak eksternal. Dasar pemikiran teori ini adalah perusahaan atau organisasi akan terus berjalan jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai masyarakat itu sendiri agar sepadan.

Menurut Deegan (2000) laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan menggambarkan kesan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan agar diterima oleh masyarakat. Hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat

diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kualitas perusahaan agar dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan atas investasinya.

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi hal yang paling penting bagi organisasi untuk menganalisis perilaku organisasi. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dibatasi digunakan untuk mendorong perusahaan atau organisasi dalam menganalisis perilaku dengan memperhatikan lingkungan. Hubungan kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat sebagian dari teori legitimasi agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menggunakan sumber ekonomi yang ada.

2.3 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Prakarsa (2007) *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Pemahaman tentang pengertian *corporate governance* yang dikeluarkan dari beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) ataupun perspektif yang luas (*stakeholders*) pada umumnya menuju suatu pengertian dan maksud yang sama.

Menurut Solomon dan Solomon (2004) *good corporate governance* menggunakan sistem *checks find balance* yang menjamin perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas dengan baik kepada seluruh *stakeholdersnya* dan bertanggung jawab secara sosial dalam aktivitas bisnisnya. Definisi tersebut diperkuat oleh Oman (2001) menyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) berkaitan dengan institusi publik termasuk hukum, regulasi, dan praktik-praktik bisnis untuk mengatur hubungan antara manajer perusahaan pada pihak satu dengan pihak lainnya yang melakukan investasi sumber (pemilik dana, kreditur, karyawan, dan sumber kekayaan lainnya yang berwujud maupun tidak).

Menurut *National Committee on Governance* (2006) *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki aturan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan yang harus dipatuhi untuk menjadi tata kelola perusahaan yang baik. Aturan sistem tersebut Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) berupa prinsip-prinsip, diantaranya: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness* atau sering disebut dengan TARIF yang dijabarkan sebagai berikut:

1) *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Para

investor juga harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility adalah kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4) *Independency* (Kemandirian)

Independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu dalam proses pengambilan

keputusan sangat dipengaruhi oleh independensi. Jika independensi hilang maka dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

Mekanisme penerapan *good corporate governance* (GCG) menurut Sutedi (2012) dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh faktor internal dalam penerapan *good corporate governance* yang diprosikan melalui kepemilikan publik, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit.

2.3.1 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik diperoleh berdasarkan jumlah kepemilikan saham oleh masyarakat umum yang terdapat pada perusahaan tersebut. Rasio kepemilikan publik yang tinggi diprediksikan akan melakukan tingkat pengungkapan sosial yang lebih baik, sehingga pemegang saham perusahaan lebih memperhatikan tanggungjawabnya terhadap masyarakat (Hasibuan, 2001). Sedangkan menurut Mursalim (2007) Kepemilikan saham perusahaan oleh publik menandakan bahwa masyarakat telah melihat adanya potensi atas profitabilitas perusahaan sehingga bersedia menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Perusahaan akan terus mengembangkan bisnisnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan sebagai suatu keunggulan kompetitif, agar masyarakat bersedia untuk terus menanamkan modalnya di perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin besar mekanisme pengendalian terhadap perilaku manajemen, dengan kata lain meningkatnya kepemilikan saham oleh publik akan disertai dengan semakin besarnya peluang terpilihnya dewan direksi dari luar, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Komang, 2013).

2.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan

investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional juga dapat mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring dengan baik dan efektif. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Bernandhi, 2013).

Menurut Yunitasari (2014) pemegang saham institusional memiliki *resources*, *opportunity* dan *expertise* untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka sangat mudah bagi investor institusional untuk membangun reputasi perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Cornet et al. (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih menfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan. Hal ini akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pihak manajemen akan lebih terintegritas.

2.3.3 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi atas tanggungjawabnya sesuai dengan anggaran dasar yang ditetapkan. Kerangka dalam tata kelola perusahaan dapat memastikan pedoman strategis perusahaan dan akuntabilitas dewan

komisaris yang efektif dari manajemen untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004).

Menurut Utami (2008) jumlah dewan komisaris yang semakin banyak akan mempermudah untuk mengendalikan CEO serta monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Berkaitan dengan pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* (CSR), manajemen juga akan semakin besar tekanan untuk mengungkapkan CSRnya. Oleh karena itu keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan sangat penting dan bergantung untuk dapat menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar pelaksanaan tugas dewan komisaris berjalan secara efektif (KNKG, 2006) :

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen.
- 2) Anggota dewan komisaris harus profesional dalam arti anggota dewan komisaris harus memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai kepada pemberhentian sementara.

2.3.4 Komite Audit

Komite Audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau tugas-tugas khusus atau

sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dengan adanya komite audit, dewan komisaris dan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan (Tugiman, 1995).

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep. 29/PM/2004 bahwa komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan serta bertanggung jawab terhadap pengawasan proses pelaporan keuangan. Selain itu komite audit merupakan penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan manapun dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan. Komite audit diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan sehingga laporan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Komite audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah komite audit yang ada dalam masing-masing perusahaan sampel (Ismail, 2008).

Landasan pembentukan komite audit di Perusahaan juga dari keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 339/BEJ/2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang mengharuskan pembentukan Komite Audit bagi Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek serta rumusan tugas dan

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan kegiatannya komite audit tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam Perusahaan.

Susiana dan Herawaty (2007) menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memastikan laporan keuangan yang diterbitkan sesuai dengan praktik akuntansi berlaku umum.
2. Memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan sangat memadai.
3. Menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan yang sifatnya material di bidang keuangan serta implikasi hukumannya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanudjaja (2006) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut bermanfaat terhadap masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang membuat masyarakat berterimakasih terhadap kehadiran perusahaan dalam lingkungannya.

Penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menyadari perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis yang sangat penting. Menurut Wirakusuma dan Yuniasih (2007), akuntabilitas dapat dipenuhi dan asimetri informasi dapat dikurangi jika perusahaan melaporkan dan mengungkapkan kegiatan CSRnya kepada

stakeholders, sehingga *stakeholders* dapat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan CSR dan memberikan penghargaan/sanksi terhadap perusahaan sesuai hasil evaluasinya.

Pengungkapan CSR yang telah berkembang di Indonesia merujuk pada standar *global reporting initiatives* (GRI). Kemudian ikatan akuntan manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia *Sustainability Report Awards* (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*.

Dalam pengungkapan GRI, terdapat tiga fokus, yakni :

- 1) Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*) yang terdiri dari 9 item.
- 2) Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*), yang terdiri dari 30 item.
- 3) Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*) yang terdiri dari 40 item.

Dan menurut Hasibuan (2001) bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut :

- 1) *Basic responsibility* (BR) Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, seperti perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

- 2) *Organizational responsibility* (OR) Pada level kedua, menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan dari “*stakeholder*”, seperti karyawan, pemegang saham dan masyarakat di sekitarnya.
- 3) *Societal responses* (SR) Pada level ketiga, menunjukkan tahapan interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan secara keseluruhan terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya.

2.5 Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013).

Menurut Titisari (2009) Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan juga sebagai gambaran tentang kinerja perusahaan kepada para *stakeholder*. Sedangkan menurut Bambang (2013) laporan keuangan sebagai informasi yang sangat penting dalam menilai kinerja perusahaan, sehingga laporan keuangan harus mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya pada kurun waktu tertentu untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan.

Pengukuran kinerja perusahaan yang baik adalah menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang sering digunakan investor dalam melakukan penanaman modal adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh penelitian sebelumnya adalah *return on asset* (ROA). Oleh karena itu penelitian ini juga menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan ROA dapat memberikan gambaran atas tingkat pengembalian dan keuntungan yang dapat diperoleh investor atas investasinya dan juga investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal (Prasinta, 2012).

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan *good corporate governance*, *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan perusahaan yang disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat dan Teori	Hasil
1.	Mercedes dan Fernandez (2015)	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> Corporate social responsibility Variabel Dependen :	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif 107 perusahaan yang terdaftar di Madrid Stock Exchange Spanyol 2009 Alat uji kolerasi antar variabel dan R-Squared 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR sangat berpengaruh dalam mengungkapkan bahwa hasil keuangan yang lebih baik mengarah pada perilaku yang lebih baik dalam CSR dengan demikian pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. dan

		<ul style="list-style-type: none"> Financial Performance 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan SPSS 	semakin besar kepatuhan dengan rekomendasi dari CG yang baik maka semakin baik kinerja keuangannya yang artinya bahwa CG memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangannya.
2.	Mwangi dkk (2013)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> Corporate social responsibility <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Yang di Audit 	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitatif Perusahaan yang terdaftar di sektor manufaktur, konstruksi dan sekutu dari Nairobi Securities Exchange. Model regresi berganda dan mencantumkan variabel control efisiensi manufaktur dan Menggunakan SPSS 	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara <i>corporate social responsibility</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kinerja keuangan itu sendiri memiliki hubungan terbalik linier yang signifikan dengan efisiensi manufaktur.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat dan Teori	Hasil
3.	Dian Prasinta (2012)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan GCG <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> kuantitatif 31 perusahaan di Indonesia alat uji yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan koefisien determinasi Menggunakan SPSS 	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> tidak memiliki hubungan dengan <i>return on assets</i> (ROA) dan tobin's Q, namun <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>return on equity</i> (ROE),

4.	Muliani dkk (2014)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai perusahaan <p>Variabel Pemoderasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSR dan GCG 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012. • Diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji t dan moderasi CSR dan GCG • menggunakan SPSS. 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR secara positif mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan sedangkan GCG mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan ke arah negatif.
----	--------------------	---	--	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Peneliti	Variabel	Metode, Sample, Alat dan Teori	Hasil
5.	Rifqiyah (2016)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Ukuran perusahaan • Kepemilikan publik <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan CSR 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Perusahaan manufaktur berprofit tinggi yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. • Menggunakan alat uji regresi linier • menggunakan SPSS. 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sedangkan Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
6	Siregar (2017)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit • Dewan Komisris • Kepemilikan saham 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2014. • Menggunakan uji 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR sedangkan

		<p>institusional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham asing • Kepemilikan saham publik <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengungkapan CSR 	<p>regresi linear sederhana dan regresi linear berganda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan SPSS. 	<p>kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Kemudian kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.</p>
--	--	--	---	---

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Peneliti	Variabel	Metode, Sample, Alat dan Teori	Hasil
7.	Melia dan Yulius (2015)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisris • Kepemilikan manajerial <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Perusahaan sektor keuangan tahun 2011-2013. • Alat uji regresi linier berganda • Menggunakan SPSS. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA.
8.	Intan dan Sedana (2016)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisris • Kepemilikan institusional <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Return On Asset</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Perusahaan otomotif dan komponen di BEI periode 2010-2014. • Alat uji analisis linear berganda • Menggunakan SPSS. 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.

		(ROA)		
--	--	-------	--	--



2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Adapun hipotesis pada penelitian ini :

2.7.1 Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Majeed, et.al. (2015: 545) menyatakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan sebagai sumber untuk menarik pemegang saham institusional yang baru karena perusahaan memiliki rencana kerja yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham pada perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusional yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

Kepemilikan institusional pada umumnya untuk melakukan pengawasan atau monitoring yang ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial lebih besar atau detail sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Karena dengan adanya monitoring yang tinggi, maka informasi yang diungkapkan akan lebih detail (Machmud & Djakman, 2008)

Menurut penelitian terdahulu oleh Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer dan meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam tanggung jawab sosial, sehingga dengan semakin besar kepemilikan institusional

dalam suatu perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan pelaksanaan CSR yang lebih luas.

Hubungan antara kepemilikan institusional dan *corporate social responsibility* menurut Ririn (2011) adalah secara teoritis semakin kepemilikan institusional menjadikan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan. Pengawasan oleh pemilik saham institusional dapat membuat manajemen mengungkapkan informasi sosial yang dilakukan perusahaan. Manajer perusahaan akan berusaha mengungkapkan informasi sosial dalam rangka meningkatkan *image* perusahaan, meskipun manajer harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Menurut Rustiarini (2011) kepemilikan institusional pada umumnya melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, sehingga otomatis pihak tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapannya. Sedangkan menurut Rahmawati (2014) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan dikarenakan pihak institusi lebih memaksimalkan harga saham. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1_a : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kartikawati (2007) menyatakan kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Dalam memonitoring manajer, kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan dapat berdampak pada pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan.

Menurut Permanasari (2010) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional lebih besar dapat mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Selain itu, struktur kepemilikan mampu mempengaruhi jalannya perusahaan dan berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu kepemilikan institusional dapat dikatakan sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan dan Sedana (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan ROA. Dengan meningkatnya kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka dapat meningkatkan dorongan pihak institusi untuk mengawasi

manajemen. Dengan adanya investor institusional dalam suatu perusahaan juga dapat membantu mengurangi masalah keagenan yang terjadi, yaitu masalah yang timbul antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1_b: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.7.3 Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dewan komisaris merupakan salah satu faktor yang cenderung mempengaruhi pengungkapan CSR. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hasil yang beragam. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO, sehingga pengawasan atas aktivitas yang dilakukannya akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan (Sitepu dan Siregar, 2008).

Dalam kaitannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan maka memberikan tekanan yang besar kepada para manajemen dalam melakukan pengungkapan. Dewan komisaris merupakan wakil *shareholders* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas dengan fungsi pengawasan pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh para manajemen dan memiliki tanggung jawab dalam menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam

pengembangan dan penyelenggaraan pengendalian internal perusahaan (Mulyadi, 2002).

Menurut Fahrizqi (2010), Dewan komisaris juga dapat mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada suatu perusahaan, sehingga semakin besar ukuran dewan komisaris didalam suatu perusahaan maka semakin besar juga luasnya pengungkapan yang akan dilakukan karena dimana dewan komisaris sebagai pelaksana tertinggi dan memiliki peranan penting didalam suatu perusahaan. Sehingga dewan komisaris memiliki wewenang yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap manajer dalam menekankan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Menurut Rahmawati (2014) bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan tidak sejalan dengan penelitian yang lakukan oleh Krisna dan Suhardianto (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, disebabkan oleh dewan komisaris lebih menerapkan pada fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan kinerja sosial. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2_a : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.7.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan komisaris berfungsi sebagai meningkatkan pengawasan pada perusahaan. Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Di dalam *corporate governance* dikenal dewan komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan dan menilai kualitas tata kelola perusahaan. Dewan komisaris memainkan peran penting dalam memonitor dan mengawasi manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Bukhori (2012) Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG dengan baik. Dengan semakin banyak anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik dan masukan atau opsi yang diberikan kepada direksi jauh lebih banyak. Arah hubungan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan menggunakan profitabilitas ialah positif.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang hubungan dewan komisaris dan kinerja perusahaan masih menunjukkan hasil yang kurang konsisten. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widagdo (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Melia dan Yulius (2015) bahwa ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam

menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Oleh karena itu dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2_b : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.7.5 Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Ho dan Wong, (2001) keberadaan komite audit dapat mengindikasikan kualitas pengawasan dan memiliki efek yang lebih baik bagi manajemen dalam menyediakan lebih banyak informasi kepada pemakai laporan keuangan. Komite audit melakukan pekerjaannya secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dan memperkuat dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit serta implementasi dari GCG pada perusahaan.

Keberadaan komite audit juga diharapkan membantu kinerja dewan komisaris dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan untuk mengatasi adanya konflik kepentingan yang timbul antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Dengan demikian, semakin banyak anggota komite audit akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan (Ratnasari, 2011).

Menurut Siregar (2017) dan Sembiring (2005) bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan tanggungjawab social perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka semakin luas pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3_a : Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.7.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Sutedi (2011) komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas audit atau eksternal audit. Oleh karena itu peran komite audit sangat penting dalam mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang.

Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tidak lanjut hasil yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan dalam melaporkan keuangan, yaitu untuk memenuhi keinginan *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan (DeZoort et al, 2002).

Komite audit bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu komite audit sangat mempengaruhi kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, pengawasan yang dilakukan semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat (Arifani, 2013).

Dan menurut Isti'adah (2015) yang menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal. Dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3_b : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.7.7 Kepemilikan Publik terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Hadi dan Sabeni (2002), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham publik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh masyarakat luas dengan pihak internal perusahaan terhadap saham perusahaan. Agar

publik mau untuk melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut diperlukan untuk perusahaan memperlihatkan eksistensi dan keunggulan perusahaannya terhadap publik, dimana salah satu cara dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan kepemilikan saham publik menurut Putra (2011) merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat terhadap saham perusahaan. Masyarakat atau publik merupakan individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada di luar manajemen serta tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Menurut Badjuri (2012), Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki oleh publik, menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus sehingga akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas. Selain itu, perusahaan dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham publik yang luas cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial yang lebih luas karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral terhadap masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqiyah (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan social laporan keuangan. Publik merupakan investor yang lebih mementingkan pergerakan harga saham karena mereka ingin mendapatkan return sebesar-besarnya dari investasi yang mereka

lakukan. Sehingga tingkat pengungkapan CSR yang tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4_a : Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.7.8 Kepemilikan Publik terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Purba (2004), Kepemilikan publik merupakan satu-satunya pembentuk kepemilikan. Dengan demikian masyarakat mengharapkan pihak manajemen perusahaan melakukan pengelolaan saham dan membuktikan kinerjanya dengan sebaik-baiknya. Namun kepemilikan publik tidak mampu meningkatkan efisiensi operasi, investasi modal serta tidak mampu menurunkan tenaga kerja. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan proporsi kepemilikan saham oleh masyarakat (publik).

Semakin besar kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (publik) dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Masyarakat atau publik yang menanamkan modalnya menginginkan hasinya (return) atas keikutsertanya didalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan lebih efektif karena adanya monitoring dari publik. Kepemilikan publik memiliki peran penting dalam mengurangi biaya agensi didalam perusahaan (Winata, 2012).

Menurut Utami (2015) struktur kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa

perusahaan sangat mengharapkan adanya investasi yang memadai dari investor individual sehingga bisa menambah modalnya dalam menunjang kinerja perusahaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4_b : Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.7.9 Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Kiroyan (2006) pengungkapan kinerja keuangan sangat penting bagi para pelaku pasar, oleh karena itu perusahaan perlu mengungkapkan informasi yang bermutu terhadap lingkungan agar perusahaan dapat dikatakan memiliki *environmental performance* yang baik. Perusahaan diharapkan menerapkan CSR agar dapat memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang tinggi akan dapat mengungkapkan hasil dari CSR dengan baik yang tercantum dalam laporan tahunan sehingga masyarakat dan pelaku pasar modal akan mengetahui kinerja perusahaan.

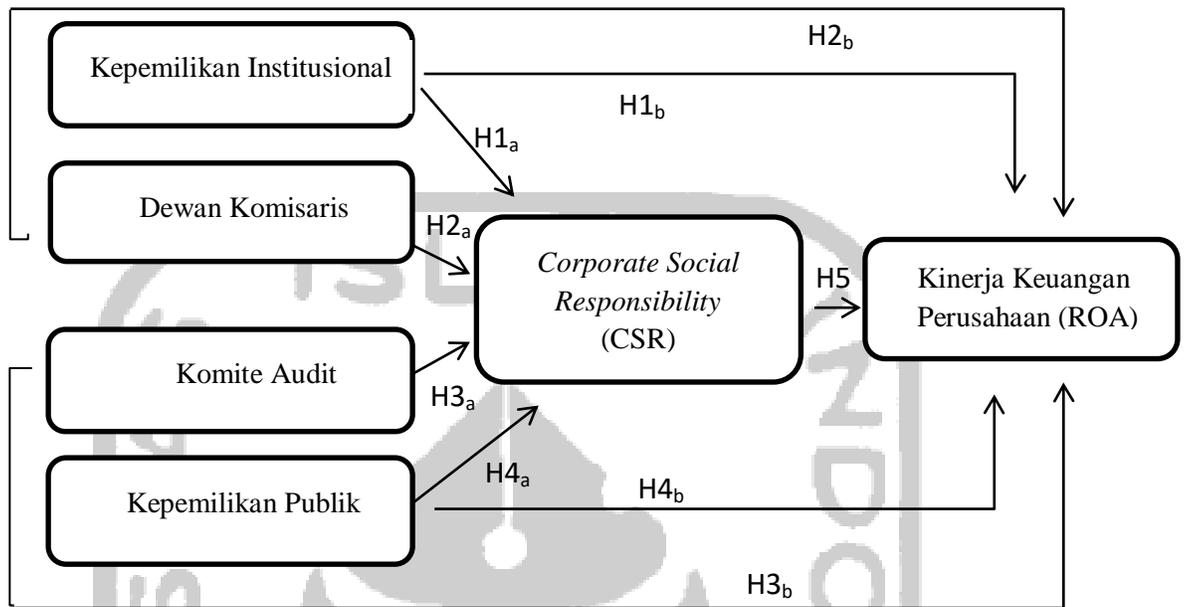
Informasi dalam laporan keuangan perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pasar modal secara individual maupun secara keseluruhan bagi investor dan pasar. Informasi tersebut juga dapat meyakinkan investor atau pasar bahwa hasil kinerja perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Hubungan antara pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan diharapkan dapat memberikan

sinyal informasi yang berguna dan direspon baik oleh masyarakat luar (Listyanti, 2011).

H5 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.8 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2014:93) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Keuangan Perusahaan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka konseptual seperti yang disajikan pada gambar 2.1 :



GAMBAR 2.1 MODEL PENELITIAN